

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan terus menjadi salah satu fenomena sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, sejarah sebuah negara yang telah lama mengurus kemiskinan tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses kepelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan sandang, dan papan secara terbatas.¹

Kemiskinan hingga sekarang ini masih menjadi *issue* global. Hal ini mengandung pengertian, kemiskinan tidak saja masalah pokok di negara dunia ketiga, tetapi juga masih menjadi persoalan di negara-negara maju. Menurut Muchtar (pemberdayaan berbasis kelembagaan) bahwa kemiskinan bagi negara ketiga merupakan momok kerana merupakan persoalan sosial terbesar dalam masyarakat.

¹Jafar Khafsaf,2008. *Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit : Bandung Iris Pres, Hlm 25 .

Hampir disemua negara berkembang, 10, 20, atau paling banyak 30 persen penduduk dapat menikmati hasil pembangunan, sisanya, mayoritas penduduk dibawah garis kemiskinan.²

Garis kemiskinan ini nampak jelas dalam kehidupan masyarakat desa Tabumela, realitas kemiskinan tersebut nampak pada kehidupan masyarakat di Desa Tabumela, Kec.Tilango Kab.Gorontalo. Terlihat dari jumlah penduduk 2.273 jiwa 576 kepala keluarga, keluarga miskin 304 kepala keluarga, sekitar 52,77 % dari seluruh jumlah kepala keluarga. Melihat prosentase keluarga miskin masih terhitung tinggi dengan adanya program bantuan (PNPM) mandiri perkotaan yang masuk di desa Tabumela dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan diberbagai negara. Di Indonesia sendiri sudah banyak program-program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan, seperti pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Hingga saat ini bangsa Indonesia juga belum benar-benar terlepas dari kemiskinan sejak krisis berkepanjangan. Disamping itu, terlepas dari kemiskinan merupakan bagaikan mimpi surga, karena kemiskinan tidak dapat dihilangkan, namun hanya dapat dikurangi.

Oleh karena itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, hadir untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, terutama pada bantuan modal usaha.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggung jawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

²Muchtar. *Artikel Strategi Berbasis Kelembagaan*: <http://keajaibankecil.files.wordpress.com>
Tanggal 25/09/2013 (22:34)

Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasianya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat miskin sering kali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama.

Isu- isu kemiskinanpun senantiasa cocok diselesaikan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangun berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Oleh karena itu ada beberapa alasan mengapa program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, sebagai program penanggulangan kemiskinan lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri.³

Sebab partisipasi masyarakat menjadi sangat penting mengingat kompleksitasnya masalah kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan tentu bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoralnya tetapi penanggulangan tersebut merupakan permasalahan multi dimensi yang menjadi tanggung jawab pihak- pihak terkait. Ada tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting terutama dalam pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan, karena program ini sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai, kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek- proyek akan gagal (2) adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.(3) mendorong adanya partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Gerakan partisipasi masyarakat bukan esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah khususnya dalam pelaksanaan program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian menjadi tugas penting manajemen pembangunan untuk membimbing menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Oleh karena itu ada beberapa alasan mengapa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Tabumela Kec.Tilango menarik untuk dibahas, khususnya terhadap bantuan modal usaha, pertama masalah kemiskinan adalah permasalahan global yang hampir dialami semua negara di dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji guna menemukan solusi penanggulangannya, khususnya di Desa Tabumela. Alasan kedua mengapa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dianggap sebagai solusi terbaru dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan setelah program-program pemerintah yang sebelumnya dianggap kurang atau tidak mampu menekan dengan maksimal angka kemiskinan

³ Pedoman Umum , 2008: <http://pnpmpnbononsel.wordpress.com>
Tanggal 09 /12/2013 (20:44)

di Indonesia, dalam hal ini termasuk program pengentasan kemiskinan di Desa Tabumela, Kec. Tilango. Di samping itu juga, sisi menarik dari PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tabumela Kec. Tilango itu untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan maksimal seperti apa yang menjadi tujuan, prinsip, dan sasaran.

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***"Dampak Bantuan Modal Dana Bergulir (PNPM) Mandiri Terhadap Masyarakat"***.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses penyaluran dana bergulir di Desa Tabumela?
- b. Apa dampak yang ditimbulkan oleh PNPM khususnya dana bergulir terhadap masyarakat Desa Tabumela ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyaluran dana bergulir pada PNPM-Mandiri Perkotaan di Desa Tabumela, Kec. Tilango
- b. Untuk mengetahui dampak pemberian modal masyarakat (Dana Bergulir) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan bagi kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tabumela, Kec. Tilango

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam studi sosiologis pada umumnya
- b. Untuk mengetahui sebab- sebab terjadi kemiskinan dalam Masyarakat
- c. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian program studi S1 sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Prodi Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo.